

PERKAWINAN LANSIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID*

SHARĪ'AH

(Studi Kasus di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)

Oleh:

Roisul Umam Hamzah

NIM. C01214022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM KELUARGA

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Roisul Umam Hamzah

Nim : C01214022

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum
Keluarga

Judul Skripsi : PERKAWINAN LANSIA DALAM

PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* (Studi Kasus di Kecamatan Socah Kabupaten
Bangkalan) Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah
hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang di
rujuk sumbernya.

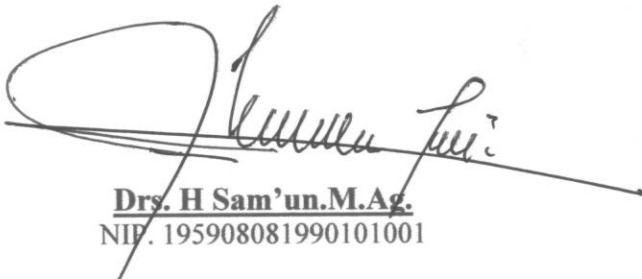
Surabaya 2018
Saya yang menyatakan



Roisul/Umam Hamzah
NIM.C91214128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Roisul Umam Hamzah NIM C01214022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.



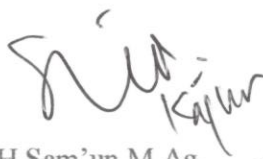
Drs. H Sam'un.M.Ag.
NIP. 195908081990101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Roisul Umam Hamzah NIM. C01214022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 6 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

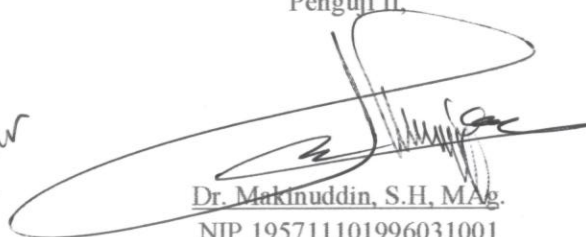
Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Drs. H Sam'un.M.Ag.
NIP 195908081990101001

Penguji II,



Dr. Maknuddin, S.H, MAg.
NIP 195711101996031001

Penguji III,



A. Mufti Khazin, MHI.
NIP 197303132009011004

Penguji IV,

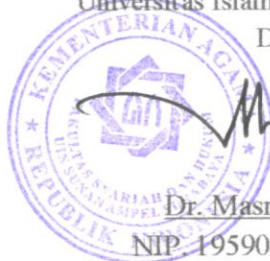


Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI.
NUP 201603306

Surabaya, Rabu 7 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Masruhan, M. Ag.
NIP 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Roisul Umam Hamzah
NIM : C01214022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : roizwolez@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERKAWINAN LANSIA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 November 2018

Penulis

Roisul Umam Hamzah
C01214022

Menjadi tua umumnya dipandang sebagai proses perubahan yang pasti berlangsung di kehidupan. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomer 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia lanjut usia adalah orang yang mencapai umur 60 tahun keatas. Setelah sekian banyak dan panjang penjelasan tentang tujuan dilaksanakannya perkawinan. Menurut hipotesis Penulis dalam tujuan perkawinan di atas terkandung aspek *maqāṣid shari'ah* yang tidak bisa di lepaskan, tujuan perkawinan dan *maqāṣid shari'ah* harus berjalan selaras karena di dalam *maqāṣid shari'ah* terdapat aspek- aspek yang dapat mewujudkan keluarga dengan tujuan menurut hukum Islam yang telah di paparkan di atas.

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, khususnya dalam tujuan pernikahan ini yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *maqāṣid shari'ah*. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat

hukumnya tidak membenarkan akan kemudatan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global.¹⁰

Dalam pengertiannya *maqāṣid shari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *shari'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan.¹¹

Muhammad Syaḥot misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep *maqāṣid shari'ah* menurut *al-Ṣatibi* mengatakan bahwa Syariat adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.¹²

Menurut Imam Al-Ghazali kemaslahatan inti atau pokok mencakup lima hal yaitu :

1. Menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*); *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menaga jiwa (*ḥifz an-nafs*); *illat* (alasan) diwajibkan hukum *qisās* diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya

¹⁰ Abd. Rasyid As'ad, *Konsep Maqahid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan*, Hakim Pengadilan Mojokerto,5

¹¹Fazlur rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (bandung pustaka,1994),140.

¹² Asafri Jaya Bakri . *Konsep Maqashid*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada,1996), 62.

- 1) *Hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), tanggung jawab suami dalam menjaga dan membina keluarga tersebut untuk menjadi keluarga Islam sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah.
- 2) *Hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) tugas dan tanggung jawab suami dalam menjaga kemuliaan istrinya dan sebaliknya saling menjaga keluarganya agar selalu dalam keadaan yang aman dan tentram.
- 3) *Hifẓ al-aql* (menjaga akal) saling menjaga keluarga agar tetap dalam keadaan Islam dan tidak melanggar larangan- larangan Allah, tidak berperilaku menyimpang dari syariat Islam yang telah di gariskan oleh Allah.
- 4) *Hifẓ al-māl* (menjaga harta) diwajibkan untuk suami dalam menjaga harta, dengan kata lain nafkah yang harus di penuhi kepada istrinya walaupun dengan keterbatasan usia yang terkadang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.
- 5) *Hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan) sebuah perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan maka konsep *maqāṣid shārī‘ah* ini sangatlah berperan penting, dengan jumlah usia yang sudah menua suami dan istri sudah tidak dapat memberikan keturunan.

Adapun kasus yang di angkat oleh Penulis adalah sebuah pernikahan lansia yang telah terjadi di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, yang akan di analisis dengan pisau *maqāṣid shārī‘ah* tentang hak- hak dan kewajiban suami istri, tujuan dan proses hingga terlaksananya perkawinan tersebut.

Penulis akan menganalisis hal- hal tersebut yang kemudian akan cocokkan dengan pisau *analīs maqāṣid shari‘ah* tentang bagaimana seorang suami lansia atau istri lansia memenuhi kewajiban- kewajiban dan hak- haknya. lansia adalah lanjut usia adalah orang yang mencapai umur 60 tahun keatas menurut Undang- Undang Nomer 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Penulis berpendapat bahwa harus diangkat sebagai judul karangan ilmiah tugas akhir semester, karena tidak menutup kemungkinan adanya penurunan fisik sehingga berdampak pada pemenuhan hak- hak dan kewajiban lansia atau bahkan dengan tujuan terlaksananya perkawinan tersebut yang hanya karena ingin memiliki ketenangan hidup dan pendamping di masa tua.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan tentang perkawinan lansia, Penulis menemukan suatu masalah yang ada di masyarakat bahwasanya perkawinan lansia di tinjau dari segi *maqāṣid shari‘ah*, maka Penulis membatasi permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang permasalahan, diantaranya:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban masing- masing suami istri.
2. Tujuan dilaksananya perkawinan.
3. pelaksanaan perkawinan lansia.
4. Syarat dan rukun.
5. Deskripsi perkawinan lansia.

1. Skripsi karya Khofid Tahtayani (2199198) dalam karya tulisnya dia mengangkat tentang Nikah Bawah Tangan dan Faktor Penyebabnya (Study Kasus di Desa Lembuharjo Kec. Pati Kab. Pati). Dalam isinya hanya memaparkan perbandingan antara hukum formal dan hukum Islam fiqh pemaparan yang dikajinya meliputi syarat-syarat yang dalam Islam. Faktor dan tujuan pernikahan bawah tangan.
2. Karya lain, yaitu saudara Muntaha (2100205) mengangkat skripsi dengan judul Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri (Study Analisis Pendidikan Imam Syafi'i) isi dari karyanya memaparkan tentang pemberian nafkah kepada istri dan kadar yang diberikan.
3. Karya lainnya Imas (2101240) dalam karya tulisnya mengangkat masalah Hak Jaminan Kesehatan Istri (Study Terhadap Ketentuan Fiqh Tentang Nafkah). Dalam karyanya hanya memaparkan ketentuan fiqh tentang kebutuhan biaya pengobatan perawatan terhadap istri, serta tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri.
4. Karya lainnya, yaitu Akhsanoel Ma'arief (2103070) tentang tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah suami kepada istri, (Studi Kasus di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes)

Bab ketiga karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian ini akan memuat bagaimana profil Kecamatan Socah dan tupoksinya, terlaksananya latar belakang perkawinan lansia, pelaksanaan hak dan kewajiban perkawinan lansia di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan

Bab keempat membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan lansia di Kecamatan Socah, Kabupaten Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan teori yang dipaparkan pada bab dua yakni menggunakan teori *maqāṣid shāri'ah*.

Bab kelima merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari Penulis. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah.

senang atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *inkāh* atau *tarwījun* untuk mendapatkan kepuasan.

c. Ulama Syafi'i

Perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafaz perkawinan atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *waṭi*.

d. Ulama Maliki

Perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *muṭah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.¹⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang definisi perkawinan yaitu: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ada beberapa rumusan penting yang harus diperhatikan dalam definisi yang di tulis dalam UU Nomer 1 Tahun 1974 tersebut yaitu:

- 1) Dipergunakan kata: “seorang pria dengan seorang wanita
“maksudnya perkawinan hanyalah antara dua jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan beda jenis.
- 2) Dipergunakan kata: “sebagai suami istri” maksudnya bahwa dengan perkawinan itu bertemu dengan dua jenis kelamin yang

¹⁸Abdurchman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah At-Tajiriyyatul Kubra), Juz 4, 2.

pria dengan seorang wanita dan yang melakukannya hanya semata-mata karena beribadah kepada Allah.²⁰

2. Hukum perkawinan

Perkawinan telah di syariatkan oleh Allah, sementara hukum asalnya adalah sunnah para ulama sependapat bahwa perkawinan itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum perkawinan²¹. Hukum perkawinan akan berbeda, tergantung dengan kadar kemampuan baik lahir ataupun dohir masing-masing individu, artinya masing-masing individu memiliki pertimbangan hukum perkawinan yang beerbeda untuk dirinya, sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam Syariat, yaitu:

a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi orang yang takut akan jatuh dalam jurang perzinahan dan ia sudah sanggup secara materiil maupun moril. Selain itu tidak ada niat untuk menyakiti wanita yang nantinya menjadi istrinya atau melalaikan kewajiban sebagai suami yang lebih penting lagi adalah ia sudah tidak sanggup lagi menahan hasrat seksualnya, meskipun dengan berpuasa.²² Maka jika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan perkawinan, maka perkawinan tersebut hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Imam al-Qurthubi mengatakan,

²⁰ Ibid., 5.

²¹ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010), 282

²² Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Perkawinan Sambil Kuliah*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm.33

sehingga tujuan perkawinan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan dari perkawinan adalah menjaga diri sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai maka ada faedahnya segera perkawinan.²⁶ Juga pada laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahir maupun yang tidak memiliki hasrat seksual, sementara perempuan tidak terganggu dengan ketidakmampuan sang calon suami. Misalnya, karena perempuan itu kebetulan seorang yang kaya raya dan juga tidak memiliki hasrat kuat untuk melakukan hubungan seksual. Kurang disukainya perkawinan ini terutama apabila dapat mengakibatkan si laki-laki seperti itu meninggalkan kegiatannya dalam beribadah ataupun dalam menuntut ilmu yang biasanya dilakukan sebelum itu.²⁷

Begitu pula makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir akan jatuh kepada perzinaan, karena manakala bertentangan

²⁶Pakih Sati, *Panduan Lengkap Perkawinan: Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011),21.

²⁷Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Karisma, 2008), 6-7.

memiliki penyakit yang akan menghalanginya berhubungan badan, maka dia tidak boleh menikah dan harus menjelaskannya.³⁰

e. Mubah.

Perkawinan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Hukum mubah juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambat untuk menikah adalah sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang melakukannya seperti orang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, sebaliknya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Menurut Hanafi perbedaannya dengan perkawinan yang dihukumi sunnah adalah tergantung pada niatnya, jika menikahkannya hanya untuk melepas nafsu seksual saja maka hukumnya menjadi mubah, akan tetapi kalau niatnya untuk menghindarkan diri dari zina dan untuk mendapatkan keturunan maka hukumnya menjadi sunnah.³¹

3. Syarat dan rukun

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau

³⁰Pakih Sati, *Panduan Lengkap Perkawinan: Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011),22.

³¹Abdurchman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah At-Tajiriyyatul Kubra), Juz 4, 12.

- 4) Syarat saksi perkawinan antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan balig.³³

Sedangkan jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad perkawinan, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³⁴

B. *Maqāṣid shāri‘ah*

1. Pengertian *maqāṣid shāri‘ah*.

Maqashid al-Syāri‘ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-Syāri‘ah* yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqāṣad* yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata *shāri‘ah* yang sejatinya berarti hukum Allah baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *Syariat* itu adalah kata “maksud”, maka kata *shāri‘ah* berarti pembuat

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 21.

³⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 45-46.

hukum atau *shar'i*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqashid al-syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.³⁵

Dari pengertian *maqāsid* dan *syarī'ah* di atas, dapat dipahami bahwa *maqāsid shārī'ah* yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum- hukum Allah. Sedangkan pencetusnya sendiri Imam Asy- Syatibi beliau tidak mengemukakan definisi secara spesifik tentang *maqāsid shārī'ah* disebabkan karena masyarakat umum sudah memahaminya baik langsung maupun tidak langsung³⁶

Sedangkan menurut ulama lain yaitu Menurut Ibnu 'Asyur: *Maqāsid shārī'ah* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau maqashid terbagi menjadi dua yaitu; maqashid umum dan maqashid khusus. Maqashid umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan maqashid khusus cara yang dilakukan oleh syariat untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.³⁷

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 231.

³⁶ Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Dâr al-Nafâ'is, 2001), 194.

³⁷ Ibid., 195.

2. Tingkatan dalam *maqāṣid shari'ah*

Hakikat dari *maqāṣid* adalah kemaslahatan. *Maqāṣid shari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencapai tujuan persyariaan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu:

a. *Maqāṣidal ḍaruriyāh* (Tujuan primer)

Ḍaruriyāh, (secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak), yaitu dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok ensensial, merupakan tujuan yang harus mutlak ada, sehingga jika tujuan ini nihil (tidak ada), maka akan berakibat fatal karena terjadinya kehancuran dan kekacauan secara menyeluruh. Bagi Wael B. Hallaq, *Ḍaruriyāh* diwujudkan dalam dua pengertian: Pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara disisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.³⁸ Menurut Imam Abu ishaq asy-Syatibi (w. 790H), ada lima perkara (hal) yang harus mendapat prioritas perlindungan. Sehingga *Ḍaruriyāh* dalam syariat dikenal dengan lima hal yang sangat penting diantaranya adalah:

- 1) Agama (*ḥifẓ ad-dīn*).
- 2) Jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)

³⁸ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni, terj E. Kusnadinigrat dan Abdul haris bin Wahid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 248.

dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan sedangkan perzinaan itu dilarang dalam Islam.

e) Menjaga jiwa (*hifz al- nafs*)

Memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadhaf*, mencaci maki serta perbuatan- perbuatan serupa.⁴⁰

b. *Maṣlahah Hajiyāt*

Al Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukḥṣah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya *rukḥṣah* pun tidak akan menghilangkan salah satu dari *Ḍaruriyāt* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesulitan. Kemudahan ini, berlaku pada Musafir pembolehan tidak berpuasa,

⁴⁰ Ali Sodiqin, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Berada Publishing, 2012), 172-173.

3. Kedudukan hukum

Pendekatan melalui *maqāsid shari'ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah).⁴²

Abu Ishaq Al-Syathibi kemudian mengembangkan Kajian *maqāsid shari'ah* ini secara luas dan sistematis. Kajian tentang *maqāsid shari'ah* ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap Syariat yang diturunkan Allah senantiasa selalu mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak ada satu pun hukum Allah di dunia ini yang tidak memiliki tujuan. Dalam Islam hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yuthaq (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan)⁴³

⁴² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 42.

⁴³Ibid., 43.

menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Selanjutnya Penulis akan menguraikan hasil dari wawancara Penulis terhadap obyek yang bersangkutan perihal hak- hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

(Pertama), pasangan Sumarsono (63) dengan Hosyah (46). Adapun untuk pemenuhan hak dan kewajiban menurut data yang Penulis dapatkan walaupun Sumarsono sudah dikatakan lanjut usia tapi masih bisa memenuhi hak dan kewajiban istri, untuk kebutuhan materi Sumarsono tidak mengeluarkan biaya kebutuhannya karena faktor lingkungan desa yang memungkinkan untuk menanam sayuran sendiri dan dekat dengan ekosistem laut sehingga membuat bahan- bahan baku makanan di sana sangatlah murah, dalam memenuhi hak dan kewajiban non materi Sumarsono masih kuasa melakukan hubungan intim walaupun sering mengeluh sakit pinggang sehingga tidak dapat sempurna seperti masih muda.

Berbeda lagi dengan penuturan Hosyah. Menurut pengakuan Hosyah, Hosyah di tekan oleh orang tuanya untuk menikah dengan Sumarsono agar supaya tali persaudaraan antara keluarga Sumarsono dan Hosyah tidak putus. Sumarsono sendiri adalah sepupu dari Hosyah, karena permintaan inilah yang tidak dapat ditolak oleh Hosyah mengingat bahwa orang tua dari Hosyah sudah sangat tua sehingga dari beberapa masukan pendapat dari sanak keluarga Hosyah menerima perkawinan ini dengan berat hati. Bahkan ketika

Penulis tanyakan tentang keikhlasan menjalani rumah tangga Hosityah mengatakan bahwa semua ini demi orang tua jika di dalam hati Hosityah yang sesungguhnya beliau masih tidak rela dan tidak ikhlas akan adanya perkawinan ini karena perkawinan ini tidak ada landasan keikhlasan walaupun Sumarsono berperilaku sangat baik kepada Hosityah, Hosityah masih tidak dapat merasakan arti sebuah keluarga, Hosityah masih merasa asing dengan suaminya sendiri dan membuat dia memilih untuk selalu diam kecuali di ajak bicara oleh Sumarsono, sedangkan Sumarsono sendiri hanya beranggapan bahwa ini hanyalah permasalahan terbiasa lambat laun Hosityah pasti akan sadar dan dapat menerima dirinya seutuhnya sebagai suami walaupun Sumarsono kadang merasa bersalah dengan perkawinan ini. Perkawinan semacam inilah yang membuat sebuah keluarga sulit untuk mencapai sakinah.

(Kedua), Pasangan Angwar (64) dengan Seujeh (36) tahun yang masih ponakannya sendiri. Bapak Angwar adalah seorang pekerja serabutan di pasar sebagai kuli panggul jika malam hari Bapak Angwar adalah salah satu nelayan di daerah pesisir selatan Kecamatan Socah, Bapak Angwar menetap di rumahnya sendiri setelah menikah dengan istrinya dengan 1 orang anaknya sedangkan 2 anak lainnya sudah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri.

Menurut data yang telah Penulis peroleh dari hasil wawancara dari Angwar, Dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik dari pihak suami atau istri antara pasangan Angwar dan Seujeh sangatlah dibilang sempurna karena Angwar semakin giat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan dengan Seujeh beliau melaksanakan hak-hak dan kewajibannya dengan baik Penulis melihat keadaan keluarga ini sangat bahagia. Adapun tentang pemberian nafkah bathin Bapak Angwar masih bisa melaksanakannya walaupun tidak sesempurna waktu masih muda dengan stamina yang tidak sebugar waktu masih muda. Dalam hal ini Seujeh memakluminya karena memang tidak bisa dipaksakan karena akan berdampak pada kesehatan Angwar sendiri.

Pada lain waktu Penulis membuat janji untuk bertemu dengan Seujeh Istri dari Angwar dan melakukan wawancara secara individual karena pada wawancara sebelumnya Angwar dan Seujeh tidak hadir secara bersamaan karena kebetulan Seujeh sedang berada diluar rumah. Data hasil wawancara yang telah di kumpulkan Penulis dari istri Angwar yaitu, Seujeh. Bahwa sikap Angwar sebagai suami telah mencerminkan sikap imam yang baik dalam keluarga akan tetapi menurut Seujeh ada satu hal yang masih belum menemukan jalan keluar dalam mencapai kesepakatan dengan suami untuk tidak memiliki anak lagi karena beberapa pertimbangan yang dianggap Angwar penting dan dirasa tidak perlu memiliki anak sedangkan

pertimbangan tersebut masih tidak dapat diterima oleh Seujeh sebagai istri, menurut Seujeh dia masih mampu dan sangat memiliki keturunan dalam pernikahan tersebut, mengingat Seujeh sendiri adalah perawan dan sangat menginginkan kehadiran anak, sehingga akhir- akhir ini Seujeh masih tidak ingin bicara terlalu banyak dengan Angwar dikarenakan faktor tersebut.

Adapun ketika Penulis mencoba menggali informasi lebih dalam lagi kepada Angwar, sehingga Penulis menemukan beberapa alasan Angwar tidak ingin memiliki anak adalah: Angwar khawatir akan ketidak mampuannya menafkahi anak yang baru lahir dan menyekolahkanya seperti anak- anak lainnya, karena keadaan Angwar yang sekarang hanya petani dan pekerja sereabutan di pasar, pertimbangan inilah yang membuat ragu Angwar dalam memiliki anak lagi.

(Ketiga), Pasangan suami istri Bapak Ahmad (66) dengan Maisaroh (50). Adapun hasil wawancara Penulis tentang pemenuhan hak- hak dan kewajiban tidak ada sebuah permasalahan karena baik nafkah batin atau nafkah lahir. Dalam pemenuhan nafkah lahir Ahmad selalu memenuhi kebutuhan dari Maisaroh bahkan menurut penuturan Maisaroh nafkah yang di berikan lebih dari cukup karena faktor usia yang membuat Maisaroh tidak membutuhkan banyak biaya terlebih lagi semua anak- anak dari Maisaroh dan Ahmad sudah menikah dan memiliki rumah sendiri.

Pada sebuah pertemuan dengan Penulis yang hanya dihadiri oleh Ahmad, Ahmad menuturkan tentang ketidak inginanya memiliki anak karena beberapa faktor salah satunya yang dipaparkan oleh Ahmad adalah faktor usia yang sudah sangat lanjut. Hal yang paling di takutkan hanyalah karena faktor biaya hidup anak ketika beranjak dewasa, walaupun sudah ada beberapa anak dari perkawinan Ahmad sebelumnya yang sudah siap membiayai adiknya tersebut.

Sedangkan pada lain waktu Penulis juga mencoba menemui istri dari Ahmad. Adapun menurut Maisaroh pun begitu, tentang ketidak inginan Ahmad untuk meiliki anak lagi, sedangkan Maisaroh sangat ingin memiliki anak dari perkawinannya dengan Ahmad. Menurut Maisaroh ini adalah sebuah keputusan yang telah di sepakati keduanya, tidak ada faktor lain kecuali umur dari Ahmad dan ke khawatiran akan masa depan anak tersebut.

Pada fase ini Seujeh mengatakan sedikit kekecewaannya walaupun sudah sepakat dengan suaminya, bagi dia memiliki keturunan dari Ahmad karena Ahmad adalah orang yang sangat baik dan saleh. Hal ini tidak semata mata membuat Maisaroh benci tapi memang salah satu dari tujuannya menikah adalah hanya ingin menghabiskan waktu dengan Ahmad di masa tuanya. Walaupun keinginan Maisaroh untuk memiliki anak sudah ditolak

mencakup urusan keluarga, masyarakat, umat, negara hukum, dan hubungan luar negeri.⁴⁹

Adapun dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dielihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana yang terkandung dalam kajian *maqāṣid shari'ah*, Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya keburukan, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.⁵⁰

Dari fenomena kasus yang Penulis dapatkan di lapangan terkait dengan perkawinan lansia yang di uraikan pada Bab III dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan lansia ini memiliki hasil yaitu :

1. Menikah karena tekanan orang tua yang berdampak pada sakinahnya keluarga.
2. Tidak ingin memiliki keturunan adapun faktornya adalah umur yang semakin menua sehingga timbul kekhawatiran tidak dapat menafkahi anak seperti anak- anak yang lain.

⁴⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, Judul Asli: *Darasat Fi Fiqh Maqashid Al-Syari'ah (Baina Al- Maqashid Al- Kulliyat Wa Al-Nusush Al-Juz'iyyat)*, Penerjemah: Erif Munandar Risawanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 16-17.

⁵⁰ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 39.

Adapun ketakutan yang telah di alami oleh suami telah disebutkan pada pasal 26 ayat 2 UU perlindungan anak mengatur bahwa “Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku” sedangkan yang dimaksud dengan orang tua pada pasal tersebut telah dikategorikan berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU perlindungan anak adalah “keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”

Selanjutnya pembahasan Penulis adalah tentang permasalahan perkawinan lansia yang dilaksanakan di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tentang adanya sebuah unsur paksaan dalam menikah.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab dan kabul sebagai lambang adanya rasa ridho- meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Dalam fiqih kawin paksa merupakan sebuah fenomena yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk melaksanakan perkawinan, tentunya

ini merupakan permasalahan sosial yang timbul di tengah- tengah masyarakat kita karena tidak adanya keterbukaan antara kedua belah pihak baik dari calon mempelai ataupun dari pihak keluarga. Kawin paksa ini tentu timbulnya karena banyak motif yang melatar belakanginya, misalnya perjanjian orang tua untuk saling menjodohkan anaknya ketika besar karena faktor keluarga, persahabatan atau persahabatan antar keluarga. Adapun dasar persyariatn nikah dalam Alquran, Hadis dan Ijma menurut ulama hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi *sunah, wajib, halal, makruh* dan *haram* tergantung kepada unsur hukum yang mengikutinya, seperti :

1. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap.
2. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan terjerumus terhadap perbuatan zina.
3. Hukum nikah menjadi makruh apabila seorang secara jasmani dan umur telah cukup walaupun belum terlalu mendesak. Tapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesensaraan hidup bagi anak istrinya.

4. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau menyakitinya⁵⁴

Dalam sebuah perkawinan tidaklah lepas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah adanya bentuk kerelaan pasangan tidak adanya unsur paksaan dari siapapun dalam melangsungkan perkawinan tersebut demi terbentuknya tujuan perkawinan yang sakinah. Hukum larangan pernikahan dengan paksaan telah dijelaskan dalam beberapa hadis dari Ibnu Abbas RA bahwasannya Nabi Shollallahu alai wasallama bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ الْبِكْرُ تَسْتَأْمَرُ بِنَفْسِهَا وَ إِذْنُهَا صَمَاتُهَا (رواه البخار و مسلم)

Artinya : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya, dan persetujuannya adalah diam.⁵⁵

Adapun menurut tinjauan *maqāṣid shāri‘ah* tindakan paksaan akan menimbulkan kalutnya pikiran karena ketidak serasian dan kecocokan antara kedua pasangan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang juga akan mempengaruhi tujuan- tujuan yang telah di tentukkan oleh Islam dalam konsep *maqāṣid shāri‘ah*, pemaksaan dalam menikah sudah menyalahi kaidah yaitu *ḥifẓ al-aql* (menjaga pikiran) karena segala bentuk keburukan berawal dari pikiran.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), 12.

⁵⁵ Ibid.,138.

